

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Mei 2015, Toshiba menyatakan bahwa perusahaannya melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahui bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008, di mana pada saat tengah terjadi krisis global. Terbongkarnya kasus tersebut diawali dengan penemuan audit pihak ketiga atas adanya *fraud*. Audit pihak ketiga menyimpulkan bahwa perusahaan mengalami penggelembungan laba mencapai 151,8 miliar yen atau sekitar Rp 16 triliun atau mencapai tiga kali lipat estimasi keuntungan yang diprediksi Toshiba. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis saat target tersebut tidak tercapai, sehingga manajemen berusaha untuk menunda pembukuan atas kerugian yang dialami dan karyawan tidak mampu untuk melawan perintah manajemen. Setelah kasus tersebut terbongkar, CEO Hisao Tanaka, Masahi Muromachi selaku Wakil Direktur, serta pejabat senior mengundurkan diri atas keterlibatannya pada skandal akuntansi tersebut. Pada akhir tahun 2015, Toshiba telah merugi sebesar US\$ 8 miliar. Pada awal tahun 2017, Toshiba telah berupaya keras untuk memulihkan kondisi perusahaannya, namun masih dalam proses bangkit dari dampak buruk skandal di tahun 2015 (integrity-indonesia.com, 14 September 2017).

Perencanaan pajak merupakan suatu langkah yang dilegalkan oleh pemerintah karena masih berada di dalam peraturan perpajakan. Dalam

meminimalkan beban pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak. Skandal perusahaan property IKEA adalah melakukan penghindaran pajak secara sengaja. IKEA dinilai secara sengaja melakukan rekayasa pajak dengan memindahkan keuntungan dari seluruh gerainya di Eropa ke anak perusahaannya di Belanda seperti di Lichtenstein atau Luxembourg, yang mana daerah tersebut merupakan negara yang bebas pajak. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 triliun euro atau setara dengan Rp 14.900 triliun dalam rentang waktu antara 2009 sampai 2014. Tuduhan tersebut dilayangkan oleh Green Party di Parlemen Eropa. Laporan yang dilansir dari CNN Money mengestimasi untuk tahun 2014 sendiri, IKEA menghindari kewajiban pajak hingga mencapai US\$ 39 juta di Jerman, US\$ 26 juta di Perancis, dan US\$ 13 juta di Inggris (Beritagar.id, 16 Februari 2016).

Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Aditama dan Anna (2014). mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih principal menggunakan pihak lain atau agen untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya.

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Fitriany (2013) dan Sumomba dan Sigit (2012). Fitriany (2013) meneliti

tentang pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada tahun 2011-2013. Sumomba dan Sigit (2012) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang dilihat dari adanya perubahan tarif pajak pada tahun 2008 dan tahun 2009 pada perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk melakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikasi) maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun penelitiannya, objek penelitian, serta pengukuran yang dilakukan untuk mengukur perencanaan pajak sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Tahun yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2015 dan tahun 2016. Berbeda dengan objek yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian ini adalah perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bukan hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja yang diteliti oleh Fitriany (2013) dan Sumomba dan Sigit (2012). Pengukuran yang dilakukan untuk mengukur perencanaan pajak menggunakan rumus yang telah dirumuskan oleh Wahab dan Holland (2012) yang berbeda dengan Fitriany (2013) dan Sumomba dan Sigit (2012). Manajemen laba sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* model modifikasi Jones (1995).

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian karena masih terdapat perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dilakukan pada perusahaan non manufaktur atau perusahaan manufaktur, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perencanaan

pajak berpengaruh atau tidak terhadap manajemen laba serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat lebih relevan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Go Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi:

1. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan

2. Bagi kreditur

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dan memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah kredit yang diberikan dapat dibayar pada saat jatuh tempo

3. Bagi akademisi

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini



